

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan APBN di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma di dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara Pasal 1, pengertian Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Dari pengertian tersebut tersurat 5M fungsi bendahara pengeluaran, yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. Uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran berasal dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, dan pendapatan lain yang menjadi hak negara. Uang tersebut disimpan dalam rekening bendahara pengeluaran di bank dan sebagian dapat disimpan dalam brankas maksimal

Rp. 50.000.000,00- . Selanjutnya uang tersebut dibayarkan kepada yang berhak sebagai belanja negara atau disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara.

Selain menerima, menyimpan, dan membayarkan, tugas berikutnya dari bendahara pengeluaran adalah menatausahakan. Bendahara pengeluaran harus menatausahakan seluruh penerimaan, penyimpanan, maupun pembayaran yang dilakukannya. Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat seluruh transaksi yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang yang terjadi di satuan kerja dalam suatu buku. Pencatatan transaksi oleh bendahara pengeluaran inilah yang lebih dikenal dengan istilah pembukuan bendahara pengeluaran. Setelah menatausahakan, tugas bendahara pengeluaran yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan. Secara fungsional, bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Selain itu, selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, bendahara pengeluaran juga harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada menteri/ pimpinan lembaga. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagai wujud pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya, disusun berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menggugah keinginan penulis untuk memahami lebih dalam tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran karena dimungkinkan banyak terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaporan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tata cara pembukuan bendahara pada satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara (KPPN) Padang ?
- 2) Bagaimana menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pada satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara (KPPN) Padang ?

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah :

- a) Secara umum

Memenuhi salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas , Tahun Akademik 2015/2016.

- b) Secara khusus

- 1) Mengetahui kemampuan penulis dalam memahami, menguasai, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Program Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- 2) Membandingkan antara pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dengan praktik kerja di lapangan.

- 3) Memperoleh gambaran mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

1.4 Ruang Lingkup

Salah satu tugas dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran adalah melakukan Pembukuan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pembukuan bendahara pengeluaran yang disesuaikan dalam format baku menurut PER-3/PB/2014 tentang *Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara*. Keseluruhan proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran tersebut membutuhkan ketepatan dan kecermatan dari semua lini baik dari bendahara pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Dengan begitu, untuk lebih memfokuskan pembahasan dan menyempitkan permasalahan yang akan timbul dalam laporan ini, penulis hanya akan membahas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Laporan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*).

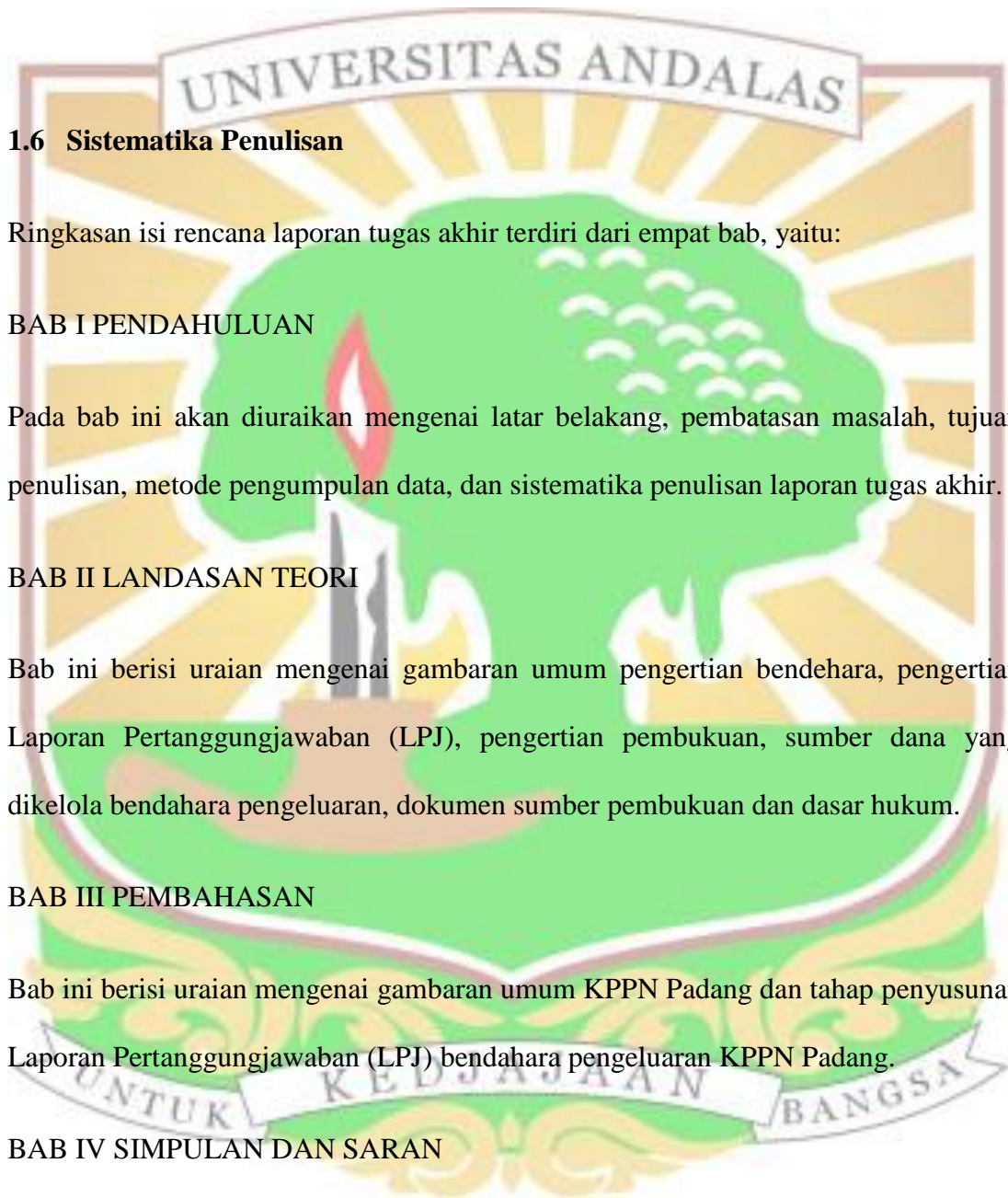
Metode studi kepustakaan ini bertujuan untuk mencari kerangka referensi dan teori-teori yang relevan untuk menjadi dasar dalam membahas masalah yang ditemukan pada saat studi lapangan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang tersedia baik berupa buku, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, maupun tulisan-tulisan lainnya dari media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan pokok bahasan tugas akhir.

2) Studi Lapangan (*Field Research*).

Dalam studi ini penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema tugas akhir melalui observasi dan pengambilan data-data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

3) Wawancara.

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dan dialog secara langsung dengan pejabat yang berwenang dan petugas yang berkaitan langsung dengan obyek penulisan untuk memperoleh gambaran serta permasalahan yang timbul secara nyata di lapangan.



1.6 Sistematika Penulisan

Ringkasan isi rencana laporan tugas akhir terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum pengertian bendahara, pengertian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), pengertian pembukuan, sumber dana yang dikelola bendahara pengeluaran, dokumen sumber pembukuan dan dasar hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum KPPN Padang dan tahap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran KPPN Padang.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan–kesimpulan dan saran–saran demi perbaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara

pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang untuk masa yang akan datang.

